



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MTS MIFTAHUL 'ULUM CIJAMBE PURWAKARTA

Moh. Sugandi¹, Zaenur Ropiq², Anti Dewi Astuti³

^{1,2,3}STAI Al Badar Cipulus Purwakarta

Email: sugandi@albadar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di Mts Miftahul Ulum Cijambe, Purwakarta, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan realitas empiris di lapangan. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembiayaan di MTs Miftahul Ulum dilaksanakan melalui rapat tahunan yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, staf tata usaha, dan guru. Kendati demikian, terdapat hambatan dalam menyelaraskan antara rencana anggaran dengan realisasi keuangan. Oleh karena itu, pihak sekolah mengantisipasinya dengan menyiapkan dana darurat sebagai langkah preventif. Pada tahap pelaksanaan, pembiayaan dikelola secara transparan melalui sistem pembukuan yang tertib, meliputi buku kas umum, daftar gaji, buku tabungan sekolah, dan pencatatan iuran SPP. Sumber utama pembiayaan berasal dari SPP siswa dan Dana BOS. Evaluasi pembiayaan dilakukan secara internal oleh kepala sekolah, bendahara, dan tim tata usaha, serta secara eksternal oleh komite sekolah dan pengawas Kemenag setiap semester. Penelitian ini menyimpulkan ternyata manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul Ulum dilaksanakan secara terencana, transparan, dan akuntabel melalui perencanaan tahunan, pelaksanaan dengan sistem pembukuan yang tertib, serta evaluasi berkala, meskipun masih dihadapkan pada kendala penyesuaian anggaran dan realisasi keuangan yang diantisipasi dengan penyediaan dana darurat.

Kata Kunci : Manajemen; Pembiayaan; Pendidikan.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the implementation of educational financing management at MTs Miftahul Ulum Cijambe, Purwakarta, in order to gain a comprehensive understanding of the planning, implementation, and evaluation of financial management in the institution as part of delivering quality education. The research employed a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and then systematically analyzed to describe the empirical realities in the field. The findings indicate that the financial planning at MTs Miftahul Ulum is conducted through annual meetings involving the principal, treasurer, administrative staff, and teachers. However, there are obstacles in aligning the budget plan with actual financial realization. To address this, the school anticipates potential shortfalls by preparing an emergency fund as a preventive measure. During the implementation phase, financial management is carried out transparently through an orderly bookkeeping system, which includes a general cash book, salary records, school savings book, and documentation of student tuition payments (SPP). The main sources of funding come from student tuition fees and government assistance (BOS funds). Financial evaluation is conducted internally by the principal, treasurer, and administrative team, and externally by the school committee and supervisors from the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) every semester. This study concludes that the financial management at MTs Miftahul Ulum is carried out in a planned, transparent, and accountable manner through annual financial planning, structured implementation with a systematic bookkeeping system, and periodic evaluations, although challenges remain in aligning the budget with actual financial realization, which are anticipated through the provision of an emergency fund".

Keywords: Management, Financing, Education

PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan elemen integral dalam proses administrasi dan manajemen pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas, pembiayaan harus direncanakan, dialokasikan, dan dikelola secara efektif. Tanpa pembiayaan yang memadai dan dikelola dengan baik, lembaga pendidikan akan menghadapi hambatan dalam meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan¹

¹ M. Bray, *Financing Education: Issues and Options*. (UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP), 2000).



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

Pembiayaan pendidikan memiliki peran strategis dalam memastikan terjaminnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan pendidikan mencakup biaya langsung (*direct cost*) maupun biaya tidak langsung (*indirect cost*)². Biaya langsung mencakup pengeluaran yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, seperti penyediaan sarana belajar, gaji pendidik, pengadaan perlengkapan, dan biaya operasional harian. Sementara itu, biaya tidak langsung meliputi pengeluaran yang secara tidak langsung mendukung kelangsungan belajar, misalnya biaya hidup siswa, transportasi, konsumsi, dan biaya kesempatan (*opportunity cost*)³⁴.

Pembiayaan sekolah atau pendidikan merupakan suatu proses pengelolaan pendapatan dan sumber daya yang tersedia guna merancang dan melaksanakan operasional lembaga pendidikan pada berbagai jenjang dan di berbagai wilayah geografis⁵. Pengelolaan pembiayaan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan guna mendukung peningkatan mutu lembaga tersebut⁶.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 mengenai Pendanaan Pendidikan. Secara umum, pembiayaan pendidikan dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pribadi peserta didik. Pengelolaan pembiayaan yang akuntabel dan transparan menjadi salah satu syarat tercapainya peningkatan mutu pendidikan⁷.

Sebagai pemimpin sekaligus pemangku kepentingan utama, kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi manajerial dalam mengelola pembiayaan pendidikan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kepala sekolah juga harus berperan sebagai administrator keuangan yang mampu mengatur pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan visi dan misi lembaga⁸.

² A. Odden and L. O. Picus, *School Finance: A Policy Perspective*, 5th ed (McGraw-Hill Education, 2014).

³ R. Levacic, *Resource Allocation for Education: Principles, Policies and Practice* (Routledge, 2008).

⁴ Achmad, dedy, Gumilang, Gilang, H. (n.d.). 3326-6127-1-Sm. *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4, 40–50.

⁵ Wandra, D., & Hadiyanto, H. (2021). *Perencanaan Pembiayaan Pendidikan*. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(5)

⁶ Moh. Sugandi & Zsa Zsa Nur Azizah (2023). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren (Penelitian Pembiayaan Pada Pondok Pesantren Pesantren Al-Huda di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat)*. Gunung Djati Conference Series 36, 586-603.

⁷ Andriani, & Mahani Mokhtar. (2019). *Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Makassar*. Jurnal Pendidikan Dasar, 10(2), 69–85.

⁸ Odden and Picus, *School Finance: A Policy Perspective*.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

Berdasarkan hasil observasi di MTs Miftahul Ulum Purwakarta, salah satu sumber pendapatan utama sekolah ini adalah pembayaran SPP bulanan yang menjadi penopang utama pembiayaan operasional. Namun, masih banyak siswa yang terlambat membayar SPP, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pendanaan sekolah. Selain itu, ketepatan alokasi dana untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran juga masih menjadi kendala. Permasalahan ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan yang baik dan berkelanjutan⁹.

Penelitian terdahulu yang relevan telah dilakukan oleh Putri Indah Utami (2021) tentang implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Perguruan Islam An Nizam Medan. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya sumbangan masyarakat sebagai sumber pembiayaan alternatif melalui dana komite sekolah. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek partisipasi masyarakat dan perencanaan bersama, sedangkan penelitian saat ini akan difokuskan pada pengelolaan administratif keuangan, mekanisme pengawasan, dan upaya peningkatan ketepatan alokasi dana di MTs Miftahul Ulum Cijambe, Purwakarta.

Hasil penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama meneliti tentang penerapan manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan formal. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang diuraikan. Penelitian terdahulu menunjukkan keunggulan dalam aspek perencanaan partisipatif dan pengorganisasian kegiatan sekolah, sedangkan penelitian saat ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan administratif keuangan dan sistem pengawasan yang melibatkan pihak eksternal secara terstruktur.

Kerangka berpikir perlu disusun sebagai gambaran umum arah jalannya penelitian. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kerangka berpikir tersebut, disajikan bagan seperti di bawah ini:

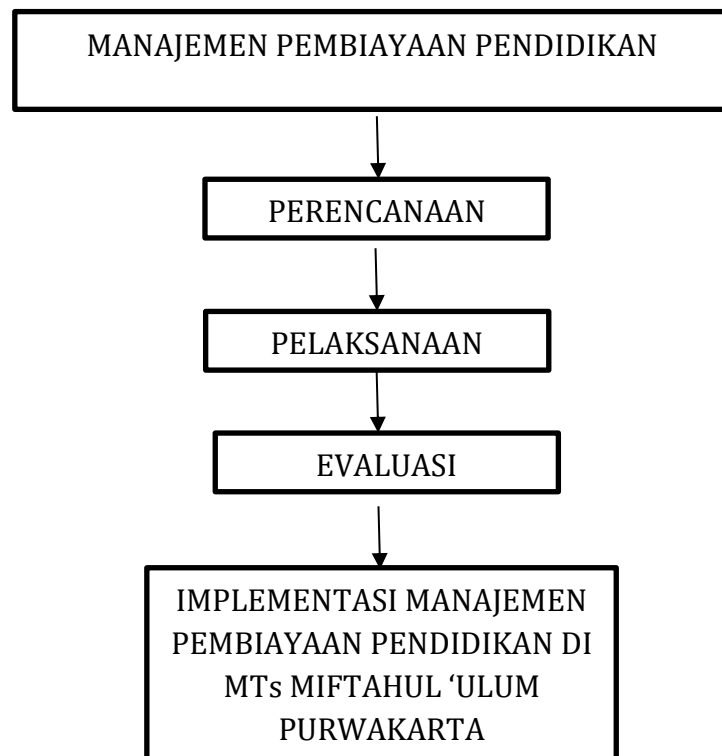
⁹ Mark Bray, *The Private Costs of Public Schooling: Household and Community Financing of Primary Education in Cambodia* (Paris: International Institute for Educational Planning/UNESCO, 1999).



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Secara teoritis, penelitian mengenai implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul 'Ulum memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan Manajemen Pendidikan Islam, khususnya pada ranah manajemen pembiayaan di tingkat madrasah. Penelitian ini mengonfirmasi sekaligus mengkritisi relevansi berbagai teori, seperti teori efisiensi manajerial, teori alokasi sumber daya pendidikan, serta kerangka input–process–output dalam manajemen pendidikan. Selain itu, penelitian ini menawarkan model implementasi pembiayaan yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik lembaga pendidikan Islam di wilayah rural maupun semiurban. Temuan empirisnya dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan studi mengenai strategi perencanaan, penganggaran, transparansi, akuntabilitas, hingga pengaruh pembiayaan terhadap mutu layanan pendidikan^{10, 11}.

¹⁰ Odden and Picus, *School Finance: A Policy Perspective*.

¹¹ Levacic, *Resource Allocation for Education: Principles, Policies and Practice*.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi langsung bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi kepala madrasah dan pengelola lembaga pendidikan, hasil temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran agar lebih efisien, transparan, serta akuntabel. Sementara itu, bagi guru dan tenaga kependidikan, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengaruh alokasi dana terhadap pengembangan profesionalisme, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Bagi komite madrasah dan orang tua peserta didik, temuan penelitian ini mendorong partisipasi yang lebih bermakna dan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pendidikan¹².

Selain itu, bagi pembuat kebijakan, seperti Kementerian Agama atau dinas pendidikan terkait, penelitian ini menyediakan data empiris yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembiayaan yang lebih berbasis kebutuhan (needs-based budgeting) dan sesuai dengan karakteristik kelembagaan madrasah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan teoritis dalam manajemen pembiayaan pendidikan, tetapi juga menyajikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di MTs Miftahul 'Ulum Purwakarta maupun pada madrasah lain yang memiliki karakteristik serupa di berbagai wilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi serta mengembangkan pemahaman secara mendalam terhadap fenomena utama yang dikaji. Dengan demikian, pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh jawaban penelitian secara deskriptif-analitis terkait manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul 'Ulum Cijambe, Purwakarta, sehingga mampu menjawab seluruh rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau realitas kehidupan manusia melalui proses pendeskripsian dan analisis data secara mendalam. Dengan kata lain, metode ini difokuskan untuk memperoleh informasi atau data mengenai kondisi atau gejala yang sedang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan, memberikan gambaran mengenai fenomena yang ditemukan di lapangan, serta mengungkap makna dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk

¹² Bray, *Financing Education: Issues and Options*.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul 'Ulum Cijambe, Purwakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di MTs Miftahul Ulum

Perencanaan merupakan proses proyeksi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kegiatan identifikasi, inventarisasi, serta penentuan kebutuhan berdasarkan skala prioritas, perumusan target secara terperinci, penetapan kriteria pemenuhan kebutuhan, dan pemilihan alternatif serta strategi pelaksanaan. Dalam konteks pendidikan, perencanaan menjadi kebutuhan mendasar sebagai respons terhadap dinamika masyarakat modern, seperti pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan tenaga kerja, persoalan lingkungan, serta keterbatasan sumber daya, sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien¹³.

Perencanaan pembiayaan di MTs Miftahul Ulum disusun secara cermat guna memastikan penggunaan dana pendidikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dalam mendukung seluruh aktivitas sekolah. Proses perencanaan diawali dengan penyelenggaraan rapat umum pada awal tahun ajaran untuk merumuskan alokasi dana yang akan digunakan dalam mendukung berbagai program dan kegiatan sekolah. Perencanaan tersebut dilakukan melalui identifikasi kebutuhan yang diprioritaskan, seperti pembayaran gaji guru, pengadaan alat tulis kantor (ATK), penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan bagi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana yang masih terbatas, serta kebutuhan penting lainnya.

Perencanaan berfungsi merinci tujuan, cakupan kegiatan, pihak yang terlibat, serta sumber daya yang diperlukan, sekaligus menetapkan langkah dan metode kerja yang paling efisien sebagai acuan pengelolaan sumber daya pendidikan. Perencanaan juga menjadi kerangka dasar dalam mobilisasi dan pemanfaatan sumber daya serta berperan sebagai alat kendali untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan, sehingga melalui perencanaan yang komprehensif, terintegrasi, dan strategis, potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat diminimalkan.

Proses perencanaan pembiayaan di MTs Miftahul Ulum dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mengacu pada teori yang relevan. Tujuan dari perencanaan ini adalah agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹³ Wandra, D., & Hadiyanto, H. (2021). *Perencanaan Pembiayaan Pendidikan*. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

Pengelolaan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Mengingat pendidikan berperan sebagai sumber energi utama dalam membentuk peradaban suatu bangsa, maka visi yang jelas dan tajam dari para administrator serta pengambil kebijakan pendidikan menjadi faktor krusial dalam mengembangkan potensi SDM secara menyeluruh guna mencetak individu yang berkualitas. Pemahaman yang mendalam dari administrator utama, dalam hal ini kepala sekolah, sangat diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan mendasar terkait dengan penetapan, pemilihan, dan pengelolaan pembiayaan yang berkaitan dengan tenaga pendidik; jangka waktu penetapan biaya pendidikan di seluruh bidang layanan; serta proyeksi kebutuhan anggaran yang diperlukan di masa mendatang¹⁴.

Menurut Gaffar, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses dalam menetapkan tujuan serta memilih cara yang paling optimal untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan secara efektif¹⁵. Dalam proses perencanaan pembiayaan di MTs Miftahul Ulum, seluruh unsur sekolah dilibatkan, antara lain kepala sekolah, bendahara, staf tata usaha (TU), serta para guru. Termasuk di antaranya adalah guru pembina ekstrakurikuler yang diwajibkan untuk merinci kebutuhan anggaran selama satu tahun ke depan. Kondisi ini selaras dengan teori yang menyatakan bahwa kepala sekolah perlu memiliki kompetensi dalam mengelola pembiayaan sekolah, yang didukung oleh peran aktif bendahara dan staf tata usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara MTs Miftahul 'Ulum, dalam perencanaan pembiayaan terdapat banyak kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang dihadapi berkaitan dengan besaran anggaran, di mana rencana yang telah disusun terkadang tidak sejalan dengan kondisi keuangan yang tersedia. Sebagai solusi, bendahara selalu menyiapkan dana darurat, yaitu dana khusus yang disimpan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga.

Kendala lain yang dihadapi dalam perencanaan pendidikan mencakup terbatasnya pemahaman terhadap indikator-indikator dalam laporan mutu, rendahnya kemampuan dalam menganalisis akar permasalahan, serta solusi yang ditawarkan masih bersifat parsial, yakni hanya dilihat dari satu perspektif dan belum menyeluruh. Di samping itu, kegiatan monitoring dan evaluasi belum terlaksana secara optimal, pelaksanaan perencanaan belum berjalan secara

¹⁴ Syaifudin, & Murtafiah, N. Hi. (2022). *Konsep Perencanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Unisan Journal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam, 01(04)

¹⁵ Gaffar, M. (1989). *Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

maksimal, serta terdapat hambatan akibat pergantian pimpinan yang memerlukan waktu untuk proses penyesuaian¹⁶.

Salah satu solusi yang diterapkan oleh MTs Miftahul Ulum adalah menyediakan dana darurat sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal tak terduga dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Namun, kenyataannya permasalahan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, melainkan juga mencakup aspek pengelolaan. Salah satunya adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya kepala sekolah, dalam mengelola pembiayaan pendidikan secara optimal. Sebagai pemegang kewenangan tertinggi di suatu lembaga pendidikan tentunya harus bisa menjalankan prinsip-prinsip dari manajemen salah satunya dalam mengelola perencanaan Pendidikan. Dalam pendekatan MBS, sekolah diberi otonomi untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri, termasuk dalam hal keuangan¹⁷. Keberadaan dana darurat, transparansi pencatatan, serta keterlibatan seluruh elemen sekolah adalah ciri penerapan MBS yang baik.

Terry menyatakan bahwa manajemen dilaksanakan melalui empat fungsi utama, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan atau penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) sebagai satu kesatuan proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien¹⁸. Salah satu indikator bahwa perencanaan pembiayaan di sekolah ini dilakukan secara matang adalah keberadaan buku kas umum. Buku ini digunakan oleh bendahara untuk mencatat seluruh pemasukan dana, seperti pembayaran SPP dan sumber lainnya. Selain itu, terdapat daftar gaji yang digunakan untuk mencatat pembayaran honorarium guru, di mana sekitar 90% di antaranya belum menerima tunjangan sertifikasi (masih dalam status pengabdian). MTs Miftahul Ulum juga memiliki buku tabungan khusus sekolah yang difungsikan sebagai tempat pencatatan seluruh pemasukan dana pembiayaan. Di samping itu, terdapat pula buku iuran SPP yang digunakan bendahara untuk mencatat pembayaran SPP siswa setiap bulan, serta sebagai bukti administrasi bahwa siswa telah melakukan pembayaran.

Perencanaan pembiayaan pendidikan disusun berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan estimasi sumber dana agar selaras dengan alokasi dan pemanfaatan anggaran yang direncanakan. Mulyasa

¹⁶ Setianto, A., Suwarni, Tias, W., & Nurkolis. (2024). Peluang dan Tantangan Perencanaan Berbasis Data dengan memanfaatkan Rapor Pendidikan di SDN Kabupaten Kendal. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 09.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

¹⁸ Terry, G. R. (1977). *Principles of Management*. Illinois: R.D. Irwin Inc.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan upaya sistematis dalam merencanakan, memanfaatkan, dan mempertanggungjawabkan anggaran guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam konteks MTs Miftahul Ulum, keterlibatan kepala sekolah, bendahara, guru, dan staf tata usaha menunjukkan penerapan sistem pembiayaan yang partisipatif dan sejalan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.¹⁹

Perencanaan pembiayaan di MTs Miftahul Ulum dilaksanakan secara kolaboratif dan terorganisir dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, staf tata usaha, serta guru pembina ekstrakurikuler, sejalan dengan pandangan Mulyasa (2004) yang menekankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah. Penerapan pencatatan keuangan melalui buku kas umum, buku tabungan sekolah, dan daftar gaji mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi manajemen pendidikan sebagaimana dikemukakan Terry (1977), yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Strategi penyediaan dana darurat oleh bendahara menunjukkan penerapan perencanaan pendidikan yang adaptif sebagaimana dijelaskan Gaffar (1989), sementara peran kepala sekolah sebagai pemimpin transformasional (Bass & Avolio, 1994) menjadi faktor kunci dalam mengatasi keterbatasan kompetensi SDM dan memperkuat evaluasi guna mewujudkan manajemen pembiayaan yang profesional dan berkelanjutan.

Perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul Ulum telah disusun secara sistematis melalui dokumen RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah) Tahun 2024, yang memuat rincian alokasi dana berdasarkan prioritas kebutuhan pendidikan seperti:

1. Honorarium rutin dan tidak rutin PTK, operator, bendahara (Rp 91.932.000),
2. Kegiatan ekstrakurikuler, penyusunan perangkat pembelajaran, dan peningkatan kapasitas guru,
3. Pengadaan sarana-prasarana dan kebutuhan operasional lainnya seperti listrik dan internet.

Perencanaan tersebut selaras dengan fungsi perencanaan (planning) dalam manajemen sebagaimana dikemukakan oleh Terry, serta sejalan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menitikberatkan pada partisipasi dan akuntabilitas.

Namun, berdasarkan temuan lapangan dan wawancara, terdapat ketimpangan antara perencanaan dan realisasi, seperti:

¹⁹ Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

1. Kegiatan tidak terduga yang tidak terakomodir dalam RKAM, menyebabkan penggunaan dana darurat.
2. Kepala sekolah dan bendahara terpaksa menyesuaikan pembiayaan kegiatan dengan ketersediaan kas, bukan berdasarkan prioritas RKAM.
3. Ketidakesesuaian antara program dalam RKAM dan eksekusi di lapangan, misalnya kegiatan pelatihan yang direncanakan tidak berjalan maksimal karena minimnya partisipasi dan pengawasan.

Catatan Penting meskipun RKAM sudah memuat rincian anggaran yang baik, belum semua komponen pelaksana memahami dan menjalankan RKAM sebagai acuan utama, sehingga terjadi perbedaan antara “apa yang direncanakan” dan “apa yang dilaksanakan”.

B. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di MTs Miftahul Ulum

Pelaksanaan pembiayaan Pendidikan dikenal dengan adanya istilah pembukuan (akuntansi) dimana dalam hal ini jelas tertera dalam pembukuan tersebut biaya Pendidikan yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan sekolah selama satu tahun.

Akuntansi berasal dari istilah yang memiliki arti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu, akuntansi dalam konteks pembiayaan pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu proses pencatatan, pelaporan, analisis, serta pengelolaan transaksi keuangan yang terkait. Seluruh aktivitas tersebut terdokumentasi secara sistematis melalui data yang berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan.²⁰

Dalam konteks akuntansi pembiayaan pendidikan, tujuan utama yang hendak dicapai meliputi pencatatan keuangan untuk memantau seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan secara sistematis, pelaporan keuangan yang transparan sebagai sarana penyampaian informasi kepada pihak-pihak terkait, serta pengukuran efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, akuntansi pembiayaan berfungsi sebagai dasar perencanaan keuangan melalui penyusunan anggaran, alokasi dana, dan strategi pembiayaan pendidikan jangka menengah maupun jangka panjang, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Fungsi pengendalian keuangan juga menjadi bagian penting untuk menjamin pengelolaan dana berjalan sesuai program dan mencegah penyalahgunaan, yang selanjutnya diperkuat melalui kegiatan audit dan

²⁰ Kurniatin, Y. (2023). Manajemen Pendidikan dalam Pembiayaan Pendidikan. Jurnal Pendidikan Terintegrasi, 4(1), 47–55



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

pemeriksaan, baik internal maupun eksternal, guna menilai kesesuaian antara pencatatan keuangan dan kondisi riil pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Jadi, sekolah ini sudah mempersiapkan hal hal yang harus direncanakan dengan baik terkait pembiayaan Pendidikan yang cukup sensitif ketika menyangkut keuangan. Untuk mengantisipasi adanya kekeliruan sebagai bendahara umum di sekolah tersebut ibu Nabila mengatur jalannya keuangan dengan adanya buku kas umum, daftar gaji, buku tabungan khusus, dan juga buku iuran SPP.

Akuntansi pembiayaan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran akan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemanfaatan dana pendidikan. Penerapan akuntansi ini turut mendukung upaya pengendalian guna memastikan bahwa setiap pengeluaran dalam bidang pendidikan digunakan secara tepat dalam rangka memperkuat sistem pendidikan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan, baik di sekolah, madrasah, maupun pondok pesantren, dapat bersumber dari berbagai sumber keuangan yang sah dan legal. Sumber-sumber tersebut mencakup bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan, dukungan pendanaan dari yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan, kontribusi dari orang tua atau wali peserta didik serta iuran siswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penggalangan dana yang dilakukan oleh alumni sebagai wujud kepedulian dan ikatan kelembagaan, kerja sama dengan pelaku usaha atau pemanfaatan potensi kewirausahaan satuan pendidikan melalui pengelolaan dana dan aset yang tersedia, serta bantuan dari para donatur dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan²¹.

Sumber pembiayaan sekolah di MTs Mifathul Ulum yang paling utama tentunya dari pembayaran SPP per bulan karena sekolah ini adalah salah satu sekolah swasta jadi sumber dananya pun masih iuran SPP dari setiap siswa. Sumber pembiayaan yang lain yaitu adanya dana BOS dimana dana BOS ini bisa turun jika dikelola dengan baik.

Selain SPP dan Dana BOS di sekolah ini bisa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menambah pemasukan kepada sekolah tersebut. Misalnya dengan membuat UMKM di sekolah yang nantinya akan membantu sumber dana untuk sekkolah tersebut. Sebagai Lembaga swasta yang notabenenya kepemilikan pribadi

²¹ Syaifudin, & Murtafiah, N. Hi. (2022). Konsep Perencanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. Unisan Journal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam, 01(04)



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

atau dibawah Yayasan harus bisa mencari sumber dana tambahan misalnya mencari donator-donatur untuk membantu pembiayaan Pendidikan di MTs Miftahul Ulum.

Pelaksanaan pembiayaan di sekolah dikelola oleh tim Tata Usaha, dengan penanggung jawab utama bagian keuangan adalah bendahara harian yang secara rutin melaporkan setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran kepada bendahara umum. Awalnya, laporan keuangan disusun setiap bulan, namun demi meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, pelaporan kini dilakukan setiap hari. Bendahara memiliki wewenang dalam menyetujui atau menolak setiap pengajuan penggunaan dana dari masing-masing bagian, sehingga tidak seluruh permintaan dana dapat langsung disetujui. Proses persetujuan pengeluaran dana sekolah dilakukan bersama oleh kepala sekolah dan bendahara umum. Di sekolah ini, bendahara umum yang juga merupakan istri kepala sekolah diberikan kewenangan penuh oleh kepala sekolah untuk mengelola keuangan lembaga secara menyeluruh.

Bentuk pembukuan yang diterapkan di sekolah ini, tim TU melakukan pencatatan terhadap seluruh kegiatan pembiayaan. Setiap uang masuk dari pembayaran SPP ataupun dana BOS itu dirincikan dan dicatat dengan teliti dan jelas. Setiap penggunaan dana sekolah juga harus sesuai dengan prosedur yang ada misalnya harus disetujui oleh bendahara umum dan juga kepala sekolah. Yang dilibatkan dalam pembukuan ini yaitu kepala sekolah, bendahara umum, dan Tim TU 3 orang.

Pembiayaan pendidikan merujuk pada sejumlah dana yang berhasil dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Pembiayaan tersebut mencakup antara lain pembayaran gaji guru, peningkatan kompetensi profesional pendidik, penyediaan ruang belajar bagi siswa, renovasi fasilitas, pengadaan peralatan penunjang, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, serta penyediaan buku pelajaran (Setianto et al., 2024).

Pengalokasian dana sekolah ini disesuaikan dengan kebutuhan prioritas sekolah, yang menjadi prioritas sekolah yaitu seperti gaji guru, ATK, fasilitas sarana dan prasarana, kegiatan untuk ekstrakurikuler, diklat untuk guru, dan tentunya semua kegiatan-kegiatan lainnya. Karena di sekolah ini sumber pembiayaannya hanya dari iuran Infaq SPP siswa, jika siswa banyak yang belum membayar SPP maka dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan di sekolah ini tidak akan optimal. Pengalokasian dana dalam proses Pendidikan harus direncanakan dengan matang agar tidak ada kekeliruan dalam pelaksanaannya.

Pengeluaran dana pendidikan umumnya disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Namun, dalam praktiknya sering kali muncul berbagai kegiatan yang tidak terduga, sehingga realisasi pengeluaran melebihi



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

anggaran yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak sekolah memanfaatkan dana talangan atau dana darurat yang telah disiapkan sebelumnya sebagai solusi atas ketidaksesuaian anggaran.

Setiap transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran wajib dicatat oleh bendahara dalam Buku Kas Umum (BKU). Pencatatan ini dilakukan setiap kali terjadi transaksi keuangan. Jika pencatatan dilakukan dengan baik, maka perbandingan antara keberadaan sumber daya fisik dan sumber daya manusia akan menjadi lebih mudah. Pembukuan harus mampu menunjukkan mutasi terakhir setiap saat. Laporan yang akurat, lengkap, dan informatif dapat dihasilkan melalui pencatatan keuangan yang tertib dan sistematis. Pelaporan dilakukan secara rutin dan berkala, serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Awalnya, sistem pelaporan keuangan dilakukan setiap bulan sekali, namun saat ini bendahara umum yang telah fokus mengelola keuangan sekolah melakukan pengawasan dan pencatatan secara harian.

Laporan pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul Ulum mencakup rincian pengeluaran yang dilengkapi dengan bukti pendukung, seperti nota atau bon. Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu wajib disertai dokumen pembuktian guna mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Seluruh bukti pengeluaran tersebut disimpan sebagai bagian dari arsip sekolah.

Setiap rencana pengeluaran harus memperoleh persetujuan dari kepala sekolah. Sebelum memberikan persetujuan, kepala sekolah terlebih dahulu menelaah kelayakan anggaran yang diajukan. Anggaran yang disetujui merupakan anggaran yang dinilai memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Sumber pembiayaan utama di MTs Miftahul Ulum berasal dari SPP bulanan siswa, dana BOS, dan upaya inovatif lainnya seperti pendirian UMKM dan pencarian donatur. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2004) bahwa pembiayaan pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber yang sah dan harus dikelola secara profesional dan akuntabel. Proses pelaporan keuangan dilakukan secara harian melalui pencatatan dalam Buku Kas Umum, dan setiap transaksi wajib dilampiri bukti berupa nota atau bon, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Permendikbud No. 63 Tahun 2014. Dalam hal pengambilan keputusan pengeluaran, kepala sekolah dan bendahara umum memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan dana berdasarkan urgensi dan kesesuaiannya dengan kebutuhan prioritas sekolah (Gaffar, 1989).



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

Dalam implementasinya, MTs Miftahul Ulum telah melakukan pencatatan keuangan secara manual dan terstruktur, melalui:

1. Buku kas umum, daftar gaji, buku tabungan sekolah, dan buku iuran SPP,
2. Pelaporan harian oleh bendahara harian kepada bendahara umum,
3. Setiap pengeluaran harus mendapat persetujuan dari bendahara dan kepala sekolah.

Namun terdapat beberapa indikasi pelaksanaan tidak sepenuhnya sesuai perencanaan RKAM, seperti:

1. Tidak semua kegiatan yang direncanakan dalam RKAM dapat dilaksanakan, karena keterbatasan realisasi dana SPP (sumber utama dana operasional).
2. Pengeluaran untuk kebutuhan darurat yang tidak tercantum dalam RKAM, namun terpaksa dilakukan dengan menggunakan dana talang.
3. Penyesuaian kegiatan dengan kondisi faktual, mengabaikan prinsip efektivitas dan efisiensi yang menjadi dasar perencanaan.

C. Evaluasi Pembiayaan Pendidikan Di MTs Miftahul Ulum

Evaluasi pembiayaan harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berorientasi pada pencapaian tujuan mutu pendidikan, dengan melibatkan internal dan eksternal lembaga²². Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan instrumen strategis untuk menilai ketercapaian perencanaan yang telah ditetapkan sekaligus mengukur efektivitas kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pembiayaan. Melalui evaluasi, lembaga pendidikan dapat menentukan apakah pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai arah perencanaan, memberikan dasar pemberian penghargaan atau imbalan kepada staf berdasarkan kinerja, serta menjadi pijakan dalam memperbaiki dan menyempurnakan perencanaan agar aspek-aspek yang belum optimal dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.²³

Menurut Mulyasa, evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen berbasis sekolah, yang bertujuan untuk menilai efektivitas pemanfaatan dana serta memastikan keselarasan antara alokasi anggaran dengan tujuan pendidikan.²⁴ Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui besaran dana yang telah dialokasikan bagi sektor pendidikan serta menilai sejauh

²² Rohmah, L. (2021). "Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Layanan Sekolah." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 1–10.

²³ Adriansyah, H., & Maftuhah, M. (2023). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang*. Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam, 7(1), 1–24

²⁴ Mulyasa, E. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta: Remaja Rosdakkar



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

mana program-program pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan mampu memenuhi harapan yang telah ditetapkan. Melalui proses evaluasi ini, diharapkan seluruh dana yang dialokasikan untuk pendidikan dapat digunakan secara optimal sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan.

Sagala menegaskan bahwa evaluasi pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara sistematis dan berkala agar perencanaan serta pelaksanaannya dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan aktual lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di satuan pendidikan bertanggung jawab mengelola pembiayaan secara berkesinambungan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Rencana perbaikan program selanjutnya perlu disusun berdasarkan data dan hasil analisis mutu tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan program di masa mendatang mampu menutup kekurangan dan meningkatkan kualitas pembiayaan pendidikan secara berkelanjutan²⁵.

Pertanggungjawaban pembiayaan merupakan proses verifikasi untuk memastikan bahwa seluruh penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Akuntabilitas keuangan dalam lembaga pendidikan tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap rencana pembiayaan, tetapi juga menilai keterkaitan pelaksanaan pembiayaan dengan proses pendidikan serta tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak sekolah telah sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sehingga tetap berada dalam koridor pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi pembiayaan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sebagai kepala sekolah, selalu melakukan monitoring atau pemantauan terhadap keuangan yang ada disekolah dengan melakukan pengecekan buku keuangan yang dipegang oleh bendahara. RAPBS menjadi instrumen utama dalam mengevaluasi efektivitas pembiayaan, dan evaluasi mingguan hingga semesteran sangat krusial untuk menekan kesalahan dalam penggunaan dana.²⁶

Selain dilakukan oleh kepala sekolah, evaluasi ini juga dilakukan oleh bendahara umum dana tim TU setiap satu bulan sekali, khusus untuk buku pengeluaran dilakukan evaluasi setiap seminggu sekali untuk mengurangi ketidaksesuaian dengan pembiayaan yang ada. Setiap kegiatan apapun yang

²⁵ Sagala, S. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

²⁶ Kurniawan, T. (2019). "Evaluasi Manajemen Pembiayaan Berbasis Rencana Anggaran Sekolah." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(3), 105–113.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

dilakukan sekolah, ketika sudah selesai selalu rutin diadakan evaluasi, dan juga selalu membuat laporan pertanggungjawaban atas dana yang dikeluarkan agar kekurangan-kekurangan yang terjadi bisa langsung diperbaiki untuk kedepannya.

Dalam konteks pembiayaan, kepala sekolah berperan memberikan arahan dan bimbingan guna mencegah terulangnya permasalahan serupa, dengan merujuk pada evaluasi dan acuan dari tahun sebelumnya. Selain kepala sekolah dan bendahara yang melakukan evaluasi internal terhadap pembiayaan sekolah, terdapat pula evaluasi dari pihak eksternal, yaitu komite sekolah dan pengawas dari Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari dalam penelitiannya menyebut bahwa pengawasan pembiayaan oleh komite sekolah dan pengawas eksternal dapat memperkuat transparansi serta mendorong penggunaan dana yang lebih efisien dan tepat sasaran²⁷.

Komite sekolah dan pihak kemenag melakukan evaluasi pembiayaan sekolah dengan melakukan pemantauan apakah dana yang tersalurkan baik itu dari SPP per maupun dana BOS disalurkan atau dimanfaatkan dengan optimal atau tidak jadi disini peran semua pihak internal harus benar-benar dalam mengelola keuangan sekolah. Evaluasi yang dilakukan pihak eksternal yaitu komite dan pengawas yaitu setiap satu semester sekali. Jadi setiap satu semester itu dilihat apakah ada kekeliruan dalam pengelolaan pembiayaan atau tidak.

Evaluasi pembiayaan seharusnya menjadi alat untuk mengukur efektivitas perencanaan dan pelaksanaan, namun dalam praktiknya masih menemui beberapa kendala:

1. Monitoring dan evaluasi belum berjalan secara berkala dan menyeluruh,
2. Evaluasi lebih bersifat administratif, belum menyentuh substansi efisiensi dan dampak program,
3. Komitmen terhadap pelaksanaan RKAM belum kuat, ditandai dengan tidak konsistennya pelaksanaan terhadap rencana awal,
4. Kurangnya pelibatan komite madrasah dan pengawas eksternal dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran.

Padahal, menurut Mulyasa (2004) dan Sagala (2005), evaluasi pembiayaan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah harus dilakukan secara sistematis, berkala, dan dijadikan dasar untuk perbaikan perencanaan berikutnya.

²⁷ Sari, Y. D. (2022). "Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Menengah." *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 14(1), 33–41.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul Ulum telah disusun secara matang dengan melibatkan unsur internal sekolah, meskipun pelaksanaannya belum optimal karena belum melibatkan komite sekolah serta masih ditemukan ketidaksesuaian antara pengeluaran dan RAPBS. Pelaksanaan pembiayaan telah didukung oleh pembukuan yang tertib melalui pengelolaan Buku Kas Umum, laporan keuangan bulanan, dan pemantauan pengeluaran harian. Evaluasi pembiayaan dilakukan secara internal oleh kepala sekolah melalui monitoring bulanan terhadap bendahara dan secara eksternal oleh komite sekolah serta pengawas Kementerian Agama setiap semester. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas manajemen pembiayaan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur, tetapi juga oleh partisipasi, komitmen, dan koordinasi seluruh pihak dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kolaborasi berkelanjutan.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup observasi dan jumlah informan yang terbatas, serta belum dilakukannya perbandingan secara menyeluruh dengan lembaga pendidikan lain sebagai bahan pembandingan. Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi hambatan dalam menggali data yang lebih mendalam dari setiap aspek pembiayaan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian, melibatkan lebih banyak informan dari berbagai unsur, serta melakukan analisis komparatif antar lembaga guna mendapatkan gambaran yang lebih holistik mengenai manajemen pembiayaan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, dedy, Gumilang, Gilang, H. (n.d.). 3326-6127-1-Sm. *Pedagogia : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4, 40–50.
- Adriansyah, H., & Maftuhah, M. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 1–24.
- Andriani, & Mahani Mokhtar. (2019). Pelaksanaa Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Makassar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(2), 69–85.
- Apriyani, A., Safidah, N., Awilisni, S., (2022). Sumber Dana Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Unisan 01*(03), 277–287.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Sage Publications.



TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 14. No. 01. Februari, 2026, Hal: 112-130

- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Manajemen berbasis sekolah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Gaffar, M. (1989). *Perencanaan pendidikan*. Bumi Aksara.
- Kurniatin, Y. (2023). Manajemen Pendidikan dalam Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Terintegrasi*, 4(1), 47–55.
- Kurniawan, T. (2019). “Evaluasi Manajemen Pembiayaan Berbasis Rencana Anggaran Sekolah.” *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(3), 105–113.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Moh. Sugandi & Zsa Zsa Nur Azizah (2023). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren (Penelitian Pembiayaan Pada Pondok Pesantren Pesantren Al-Huda di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat)*. Gunung Djati Conference Series 36, 586-603.
- Rohmah, L. (2021). “Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Layanan Sekolah.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 1–10.
- Sagala, S. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, Y. D. (2022). “Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Menengah.” *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 14(1), 33–41.
- Setianto, A., Suwarni, Tias, W., & Nurkolis. (2024). Peluang dan Tantangan Perencanaan Berbasis Data dengan memanfaatkan Rapor Pendidikan di SDN Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09.
- Syaifudin, & Murtafiah, N. Hi. (2022). Konsep Perencanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Unisan Journal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 01(04), 151–152.
- Terry, G. R. (1977). *Principles of management*. R. D. Irwin Inc.
- Wandra, D., & Hadiyanto, H. (2021). Perencanaan Pembiayaan Pendidikan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2898–2904.